



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ABDUL MUIN THALIB**
2. Jabatan : **HAKIM TINGGI**
3. NHK : **77818**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.442.500.000**

1. Tanah Seluas 375 m2 di KOTA MAKASAR BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 17.500.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 168 m2/54 m2 di KENDARI, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/120 m2 di KOTA MAKASAR BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m2/62 m2 di KENDAL, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 238.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
2. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOBIL, HYUNDAI AVEGA SEDAN Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
4. MOTOR, HONDA SCOOPY SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
5. MOTOR, HONDA SUPRA FIT Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
6. MOBIL, DATSUN DATSUN GO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000



| | | |
|-----------------------------------|-----|---------------|
| C. HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp. | 9.450.000 |
| D. SURAT BERHARGA | Rp. | ---- |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 144.270.833 |
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | ---- |
| Sub Total | Rp. | 1.834.220.833 |
| III. HUTANG | Rp. | 18.195.000 |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | 1.816.025.833 |

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **23 Juni 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.